

# **70 tahun Bank Dunia; tentang Kemiskinan dan Hutan Kita**

Orchida Ramadhania

Ecological Justice

November 2013

# Slides Overview

Safeguard Review Jakarta

Pengalaman Washington DC

Strategic Framework

Forestry and Natural Habitat Safeguard

Rekomendasi untuk Forestry Safeguard Review

Simpulan

# Safeguard Review Jakarta

- Maret 21 – 22, 2013
- Pertemuan para pemangku kepentingan?
- Konsultasi atau **sosialisasi**?
- Draft zero
- Notulensi proses

# Washington DC Oktober 2013

1. Bank Public yang tidak punya mekanisme akuntabilitas – KYC Principle, dimana?
2. Extreme time, high risk **tapi risiko tinggi untuk siapa?**
3. Era ‘belajar dari kesalahan masa lalu’, tapi dengan cara apa?
4. Setelah 70 tahun – China & India
5. Strategi Baru Bank Dunia
6. Dinamika sesama NGO

# Strategic Framework

- Disetujui oleh para Gubernur Bank Dunia pada Oktober 2013
- Memiliki 2 Tujuan Utama:
  - Mengakhiri kemiskinan ekstrim pada 2030
  - Mempromosikan 'shared prosperity' untuk 40% orang paling miskin dengan cara yang berkelanjutan

# Elemen Utama Strategi Baru BD

1. Kerjasama antar lintas Grup Bank Dunia untuk proyek tertentu, dengan agen dari sektor publik dan **swasta; kemitraan swasta / publik**
2. Mendukung proyek transformasional yang secara fundamental akan meningkatkan kehidupan kaum paling miskin
3. Berani mengambil resiko lebih besar dan manage resiko tersebut dengan “cerdas”

# Lessons learned?

Forest Investment Program Indonesia

Independent Evaluation Group Report 2012

- Pada dekade terakhir, BD menginvestasikan USD 4.1 milyar dalam 345 proyek kehutanan
- Secara umum, BD gagal mengatasi kemiskinan atau memberi keuntungan pada komunitas lokal

# Proses Kaji Ulang Forestry and Natural Habitat Safeguard

**1991 Forest Policy Paper 1991 WBG** melarang dukungan atas industrial logging pada hutan tropis primer. Namun Strategi Hutan BD 2002 menghapus larangan ini dengan klaim bahwa peraturan tahun 1991 tersebut terlalu berorientasi konservasi dan tidak membantu mengatasi pengentasan kemiskinan



Safeguard Review termasuk merevisi Kebijakan BD tentang Habitat Alami (OP 4.04). Kebijakan yang ada saat ini tidak memperbolehkan BD terlibat dalam proyek yang menurut pendapat mereka dapat menyebabkan konversi signifikan atau degradasi pada habitat alami yang telah kritis.

Revisi OP 4.04 dan disusunnya draft rencana offsets nasional, dapat memungkinkan BD untuk mendanai aktivitas yang berdampak signifikan pada habitat alami yang telah kritis, asalkan diiringi dengan rencana offset.

## Standar lingkungan hidup dan social

(Safeguards) hanya akan berlaku untuk Proyek BD (yang jumlahnya makin sedikit) tapi tidak untuk instrumen peminjaman lainnya **yang banyak dibangun oleh BD**

(OP 4.10) menuntut ***“Free Prior and Informed Consultation leading to Broad Community Support*** jadi bukan FPIC. Consent harus diartikan hak untuk menerima dan menolak

# Rekomendasi Review Forestry Safeguard

Upward Harmonization - standard yang tertinggi  
apapun nasional ataupun internasional

Safeguards harus bersifat wajib, mengikat secara legal dan kontraktual untuk setiap aktivitas, investasi, dan proyek BD.

IFC Performance Standard tidak bisa dijadikan acuan karena berpotensi melemahkan aturan; memonitor dan implementasi di IFC banyak diserahkan ke kliennya (perusahaan)

Pada 2012, BD menerbitkan laporan penting berjudul “Justice for Forests”, yang memunculkan rekomendasi untuk mengintegrasikan sistem pidana (**anti-pencucian uang, tax evasion dll**) ke dalam strategi perlindungan hutan (untuk illegal logging, money laundering, dll). Rekomendasi ini harus menjadi bagian dari revisi Safeguard kehutanan.

Perempuan harus dilibatkan dalam tiap level pengambilan keputusan. Penilaian mengenai dampak dan resiko pada komunitas harus gender seggregated, termasuk asesmen mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan lingkungan hidup.

Human Rights Assesment Impact harus secara serius mulai dibuat.

# Simpulan

Di Indonesia, Bank Dunia masih sangat berpengaruh dan merupakan ancaman besar terhadap masyarakat dan hutan

Tujuan yang makin “risiko tinggi” tidak diiringi dengan akuntabilitas dan kejelasan tentang siapa yang akan menanggung resiko

Gerakan masyarakat sipil harus lebih baik memposisikan perlawanannya menuju 70 tahun Bank Dunia